

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG  
PENETAPAN TINGKAT KEUNTUNGAN PADA  
JUAL BELI KREDIT**

**(Studi Di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten  
Lampung Utara)**

**Skripsi**

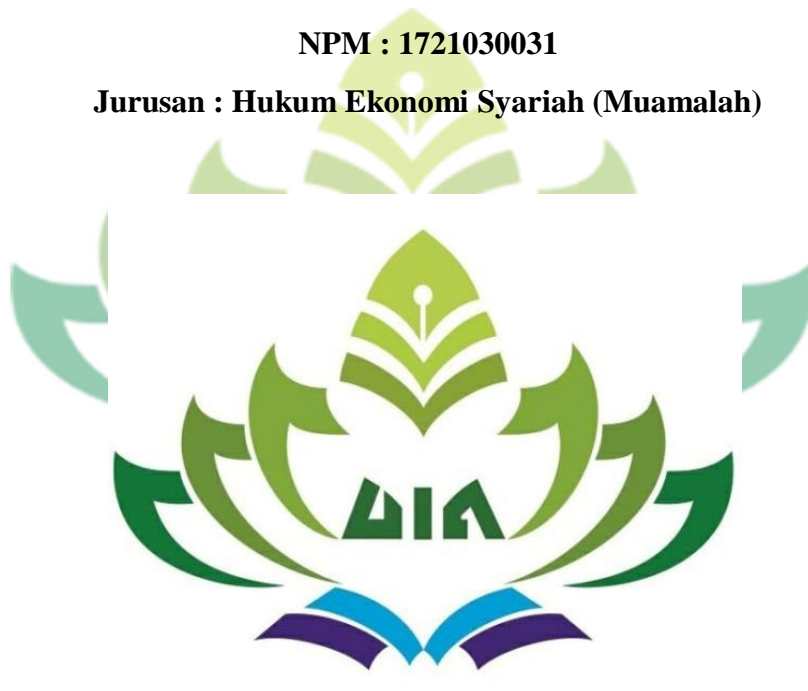
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Hukum Ekonomi Syariah (S.H)**

**Oleh**

**HELEN PERSIA IRAWAN**

**NPM : 1721030031**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENETAPAN  
TINGKAT KEUNTUNGAN PADA JUAL BELI KREDIT**

**(Studi Di Desa Kalicinta Kec. Kotabumi Utara Kab.Lampung Utara)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Hukum Ekonomi Syariah (S.H)**

**Oleh**

**HELEN PERSIA IRAWAN**

**NPM : 1721030031**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. H.A Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H**

**Pembimbing II : Anis Sofiana, M.SI**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020**

## ABSTRAK

Kalicinta adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara. Di desa ini terletak sebuah rumah penjual yang dimana tempat untuk bertransaksi jual beli kredit. Penjual memberikan kredit barang jika ada pembeli yang ingin mengambil barang dengan cara kredit dengan kesepakatan diawal penjual hanya memberitahukan berapa lama waktu yang harus dilunasi dan penjual tidak memberitahu pula berapa harga barang dan adanya penambahan yang diambil dari sisa hutang. Hal ini tentu menimbulkan ketidakjelasan dalam memperoleh objek jual beli. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem penetapan tingkat keuntungan pada jual beli kredit di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang sistem penetapan tingkat keuntungan pada jual beli kredit di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah mengenai jual beli kredit di Desa Kalicinta dan untuk mengetahui praktik pelaksanaan jual beli kredit apakah sudah sesuai dengan syariat yang berlaku. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan secara induktif. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan di Desa Kalicinta. Metode pengumpulan data yang digunakan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa sistem penetapan tingkat keuntungan pada jual beli kredit di Desa Kalicinta mengandung unsur ketidakjelasan karena penjual tidak memberitahukan berapa harga pada barang dan penjual pun tidak memberitahukan pada kesepakatan awal bahwa penjual mengambil keuntungan yang ia ambil dari sisa hutang pembeli 2%. Sedangkan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli kredit ini dilarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, dimana pada praktiknya ada salah satu rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak dan penjual merubah kesepakatan awal. Jual beli yang terjadi ini termasuk kedalam jual beli yang *batil*, karena salah satu syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi dan mengandung unsur *gharar* serta menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, sehingga jual beli ini tidak dibenarkan dalam Islam.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Helen Persia Irawan  
NIM : 1721030031  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Penetapan Tingkat Keuntungan pada JualBeli Kredit (Studi di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Januari 2021



HelenPersiaIrawan

NPM : 1721030031





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

***Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721) 703260***

**PERSETUJUAN**

Nama : Helen Persia Irawan  
NPM : 1721030031  
Jurusan : Mu' amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Tingkat Keuntungan Pada Jual Beli Kredit ( Studi di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara )

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II**

***Dr. H. A. Khumaidi Ja'far S.Ag., M.H***  
**NIP.197208262003121002**

***Anis Sofiana, M.S.I***  
**NIP.198910252019032009**

**Ketua Jurusan,**

***Khoiruddin, M.S.I***  
**NIP.197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Tingkat Keuntungan Pada Jual Beli Kredit (Studi di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara)” disusun oleh, Helen Persia Irawan, NPM:1721030031, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

**TIM PENGUJI**

Ketua Sidang : Drs. Henry Iwansyah, M.A

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I

Penguji Utama : Dr. Iskandar Syukur, M.A

Penguji Pembimbing I : Dr. H. A Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H

Penguji Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Chairuddin, M.H  
NPM: 198210221993031002



## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. (QS. An-nisa :29)



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda tercinta Papiku Dedi Irawan, SE dan mami ku Nurbaity atas semua pengorbanan dan dukungannya yang berupa moril dan materil, yang selalu senantiasa mendoakan dalam setiap waktunya, serta selalu memberikan curahan kasih dan sayang yang tak terhingga.

Adik sematawayangku teman berantem kala dirumah Raihan Ramadhan yang selalu mendoakan dan selalu memberi semangat untuk ayunda selama menjalani studi, serta Almamater tercinta Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.





## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Helen Persia Irawan, putri pertama dari pasangan Bapak Dedi Irawan, SE dan Ibu Nurbaity. Lahir di Kotabumi, 29 Juni 1999. Penulis memiliki saudara kandung yaitu Adik laki-laki bernama Raihan Ramadhan. Penulis mempunyai riwayat pendidikan sebagai berikut :

1. Taman Kanak-kanak Muslimin pada tahun 2004 selesai pada tahun 2005
2. Sekolah Dasar Negeri 1 Madukoro pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kotabumi pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kotabumi pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017
5. Lalu melanjutkan studi ke tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun 2017 dan selesai pada semester 8 tahun 2021.

Bandar Lampung, 2021

Yang membuat,

Helen Persia Irawan

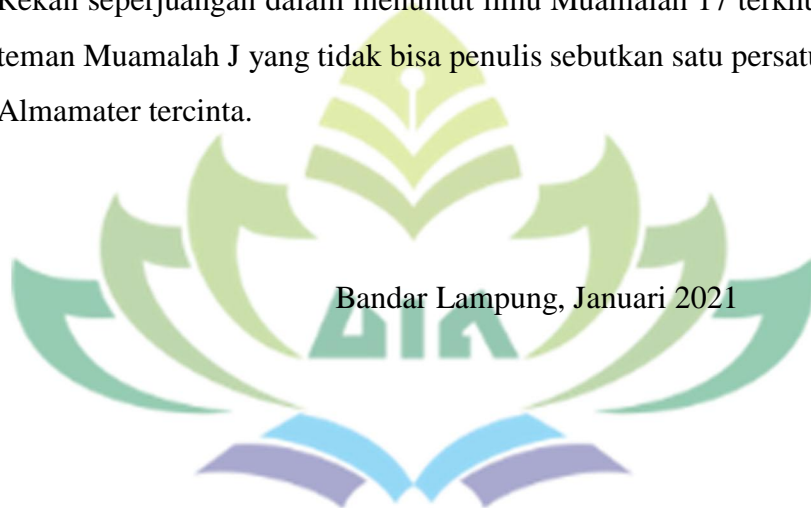
## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kelancaran. Sholawat serta salam dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang telah memberikan tauladan baik sehingga akal dan fikiran penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafa'at dalam menuntut ilmu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Penetapan Tingkat Keuntungan pada Jual Beli Kredit (Studi di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara)” tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari semua pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas kampus.
3. Bapak Khoruddin, M.S.I dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. H.A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H selaku pembimbing I. dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu serta memberi arahan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, referensi.
7. Para Responden yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian.
8. Teman terdekat penulis Rifki Wirawan yang selalu siap siaga membantu. Sahabat sahabat penulis Tri Okta Fiani, Fittania Sellawati, Darmiah yang selalu menemani suka duka penulis dari awal maba hingga sekarang yang senantiasa memberikan warna-warni bagai gulali dalam dunia perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
9. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) serta rekan-rekan Praktek Peradilan Semu (PPS) Pengadilan Agama Getong Tatatan yang telah bekerjasama dengan baik.
10. Rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Muamalah 17 terkhusus teman-teman Muamalah J yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Almamater tercinta.



Bandar Lampung, Januari 2021

Helen Persia Irawan



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	
<b>PENGESAHAN .....</b>	
<b>MOTTO .....</b>	
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. PenegasanJudul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Masalah .....	7
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Manfaat Penelitian .....	7
H. Metode Penelitian.....	8

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Kajian Teori**

1. Jual Beli Dalam Hukum Islam	
a. Pengertian Jual Beli .....	12
b. Landasan Hukum Jual Beli .....	15
c. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	19
d. Macam-macam jual beli .....	26
e. Jual beli yang terlarang .....	29
f. Batal dan berakhirnya jual beli.....	38
g. Berselisih dalam jual beli .....	40
h. Etika dalam jual beli.....	40
i. Hikmah di syariatkannya jual beli.....	43
2. Kredit dalam Hukum Islam	
a. Pengertian Kredit.....	44
b. Landasan Hukum Kredit.....	45
c. Rukun dan Syarat Kredit .....	49
B. Tinjauan Pustaka .....	50

## **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.....	54
B. Penetapan tingkat keuntungan pada jual beli kredit di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara .....	57

## **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik pelaksanaan penetapan tingkat keuntungan pada jual beli kredit .....	64
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang penetapan tingkat keuntungan pada jual beli kredit.....	67

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Rekomendasi.....	70

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam memahami judul skripsi serta mencegah adanya kesalahan dalam memahami maksud dari kata-kata yang tercantum dalam judul ini maka secara singkat terlebih dahulu akan diuraikan beberapa kata yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan dibahas “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Tingkat Keuntungan Pada Jual Beli Kredit (Studi di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara) berikut istilah yang akan dibahas ialah :

Tinjauan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan meninjau pandangan atau sebuah pendapat atau sebuah pendapat yang sudah diselidiki dandipelajari.<sup>1</sup> Tinjauan yang dimaksudkan dari penelitian ini adalah sebuah cara pandang umat Islam tentang fenomena atau permasalahan yang berkaitan dengan praktik jual beli kredit di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.

Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik jual beli, perdagangan, upah mengupah dan perniagaan yang didasarkan pada Hukum Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h.1078.

<sup>2</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta:Kencana,2019), h.2

Jual Beli Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>3</sup>

Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang saat ini.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang penetapan tingkat keuntungan pada jual beli kredit di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dilihat dari sudut kacamata Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa faktor yang dijadikan sebagai alasan penulis memilih judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Tingkat Keuntungan Pada Jual Beli Kredit (Studi di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara)” yaitu sebagai berikut :

### **1. Alasan Objektif**

Alasan memilih judul pada penelitian ini dikarenakan permasalahan ini sangat menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan kegiatan muamalah ini tidak sesuai dengan syari’at Islam, karena jual beli ini tidak ada keterbukaan harga barang dan tidak ada keterbukaan bahwa penjual

---

<sup>3</sup>Tim Penerima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*( Jakarta: Gita Media Press), h. 375.

<sup>4</sup>Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 87-88

mengambil keuntungan yang dipersenkan dari sisa hutang pembeli pada saat di awal kesepakatan.

## **2. Alasan Subjektif**

Bahwa pembahasan judul penelitian ini belum ada yang membahas khususnya dilingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan pokok permasalahann ini sesuai dengan ilmu yang dipelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia dikaruniai akal oleh Yang Maha Kuasa agar dalam hidup di dunia mereka mampu berfikir dalam menentukan tujuan hidup yang sesuai dengan syariat- Nya. Di dunia ini manusia merupakan makhluk yang mempunyai tatanan tertinggi dari segala makhluk yang diciptakan Allah maka segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di langit ditempatkan di bawah perintah manusia. Manusi diberi hak untuk memanfaatkan semuanya sebagai pengemban amanat Allah. Dengan demikian manusia dapat mengambil keuntungan-keuntungan dan memanfaatkan sumber daya alam di bumi, akan tetapi dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut ada batasan-batasan dan kaidah yang baik agar tidak merugikan pihak lain.

Islam adalah agama yang di anut oleh Umat Muslim. Dalam agama Islam ada kaidah- kaidah atau aturan- aturan yang di tetapkan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul. Hukum Islam adalah sebuah syariat yang yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat-Nya.



Manusia bukanlah makhluk hidup yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya bantuan orang lain, oleh sebab itu timbulnya sebuah transaksi jual beli yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.<sup>5</sup> Dalam pandangan Islam jual beli merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah Swt yang merupakan *Fardhu Kifayah*, oleh karena itu jual beli tidak boleh lepas dari syariah. Rasulullah melarang sejumlah jual beli karena di dalamnya terdapat *gharar* yang membuat manusia memakan harta orang lain secara batil, dan di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik dan permusuhan diantara kaum Muslimin.<sup>6</sup>

Prinsip dalam muamalah adalah harus halal dan bukan merupakan barang-barang yang haram dalam Islam. Islam sangat melarang umat nya untuk berbuat kebatilan serta hal-hal yang di benci Allah seperti yang di sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat (275).<sup>7</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Muamalat* (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: Uii Pres, 2000), h. 11.

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 78.

<sup>7</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 156.

menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Islam mengajarkan pula umatnya untuk tolong menolong dalam kebajikan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Manusia saling membutuhkan satu sama lain agar mereka dapat melakukan tolong menolong tukar menukar dalam bentuk jual beli, sewa menyewa serta kegiatan bercocok tanam demi kepentingan bersama.

Jual beli ada dua macam yaitu, sebagai berikut :

1. Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai (Jual beli secara tunai)
2. Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara angsur atau cicilan (Jual beli secara kredit)

Jual beli secara tunai dimaksudkan dengan seorang pembeli wajib membayar secara keseluruhan dari harga barang yang dibelinya bersamaan dengan waktu terjadinya akad jual beli tersebut serta tidak diperbolehkan mengambil barang sebelum melunasi barang yang telah dibelinya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan jual beli secara kredit ialah pembayaran dilakukan secara berangsur yang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama serta diikat dengan perjanjian dan hak milik atas barang tersebut diserahkan penjual kepada pembeli.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>M. Ali Hasan , *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* , h. 113

Pada penelitian yang diangkat penulis yang menjadi masalah disini yaitu pada penetapan tingkat keuntungan dalam jual beli kredit alat rumah tangga, penjual menetapkan sistem pembayaran kredit yang dipersenkan dari sisa hutang yang mana penjual tidak memberitahukan pada kesepakatan di awal, dan juga penjual tidak memberitahukan berapa harga barang tersebut. Dimana kesepakatan di awal hanya diberitahu berapa lama waktu pembayaran pembeli. Penjual memberitahu berapa jumlah yang harus dibayar dan memberitahukan harga barang tersebut saat pembeli melakukan cicilan pada bulan selanjutnya.

Misalnya pembeli membeli suatu alat rumah tangga sebesar Rp 12.000.000, kemudian pembeli membayar cicilan sebesar Rp 1.000.000 tiap bulan sebanyak 12 kali, tetapi masih ditambah bunga atas sisa hutangnya. Misalnya pada bulan pertama pembeli membayar Rp 1.000.000 sisa hutang kepada penjual Rp 11.000.000. Untuk itu, pembeli dikenakan biaya dari sisa hutang yaitu  $2\% \times 11.000.000 = 220.000$ .

Pada cicilan bulan kedua, pembeli membayar lagi 1 juta. Sisa utang pembeli tinggal 10 juta. Untuk itu pembeli dikenakan biaya  $2\% \times 10.000.000 = 200.000$ . Begitu seterusnya sampai dua belas bulan. Pada saat cicilan bulan kedua inilah penjual baru memberitahukan adanya penambahan 2% yang diambil dari sisa hutang yang mana akad di awal tidak ada perjanjian diantara penjual dan pembeli, penjual baru memberitahukan setelah memasuki angsuran kedua.



Berdasarkan keterangan di atas maka penulis menganggap masalah ini perlu dilakukan penelitian yang lebih jelas mengenai sistem penetapan tingkat keuntungan pada jual beli kredit, dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Tingkat Keuntungan Pada Jual Beli Kredit (Studi di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara).

#### **D. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memfokuskan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Penetapan tingkat keuntungan dalam jual beli kredit.

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem penetapan tingkat keuntungan pada jual beli kredit di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang sistem penetapan tingkat keuntungan pada jual beli kredit di Desa Kalicinta tersebut?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut::

1. Untuk mengetahui sistem penetapan tingkat keuntungan pada jual beli kredit di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk menganalisis serta mempertegas bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang penetapan tingkat keuntungan pada jual beli kredit di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.

## G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi serta pengembangan ilmiah terhadap penetapan tingkat keuntungan pada jual beli kredit di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini dilakukan serta dimaksudkan sebagai sarana informasi bagi masyarakat serta dapat dijadikan acuan bagi peneliti peneliti berikutnya.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan dilapangan atau responden.<sup>9</sup> Yaitu melakukan sebuah penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi langsung subjek yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.

---

<sup>9</sup>Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung. Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Instititut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.9.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat deskriptif, deskriptif merupakan menggambarkan ssuatu yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis dan mengimplementasikan kondisi-kondisi yang terjadi.

### 2. Data dan Sumber Data

Dalam metode penelitian ini peneliti mempunyai penunjang yaitu data primer dan data sekunder :

#### a. Data Primer

Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti dan diperoleh dari beberapa pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji, dokumen-dokumen dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### 3. Populasi

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.<sup>10</sup> Mengingat penelitian ini adalah penelitian populasi, maka dalam pendapat Suharsimi Arikunto bahwa : Apabila subjeknya kurang dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Dalam penelitian ini mengambil seluruh populasi yang ada sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Adapun populasi yang diteliti berjumlah 9 orang terdiri dari 1 orang penjual kredit dan 8 orang selaku pembeli kredit.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau wawancara secara langsung dan mendalam guna mengetahui unsur-unsur yang berkaitan dalam penelitian penetapan tingkat keuntungan pada jual beli kredit yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

#### b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi adalah dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

---

<sup>10</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 173



buku. Metode ini untuk menghimpun serta memperoleh data dengan cara melakukan pencatatan baik berupa dokumen maupun keterangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penetapan tingkat keuntungan pada jual beli kredit.

## 5. Metode Pengolahan Data

Dalam pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara, diantaranya :

### a. Tahapan Editing

Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.

### b. Sistematika Data

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika ahasan berdasarkan urutan masalah yang telah dikumpulkan.<sup>11</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mempelajari data yang sudah terkumpul dan mengelola menjadi bahan baku dalam penarikan kesimpulan. Setelah keseluruhan data dikumpulkan baik melalui pustaka atau penelitian lapangan selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir induktif. Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Metode induktif yaitu fakta-fakta yang sifatnya khusus lalu ditarik kesimpulan yang bersifat

---

<sup>11</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 127

umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan tingkat keuntungan pada jual beli kredit.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Jual Beli Dalam Hukum Islam

###### a. Pengertian Jual Beli

Menurut Bahasa (etimologi), jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) dari *Ba'i* (jual beli) adalah al-tijarah yang berarti perdagangan.<sup>12</sup>

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengerian lawannya, yaitu lafal *al-syifa* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>13</sup>

Jual beli menurut terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang

---

<sup>12</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.99

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2012), h.101

yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.<sup>14</sup>

Adapun pengertian jual beli menurut para ulama sebagai berikut :

1) Menurut ulama Hanafiah :

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَحْصُوصٍ

Artinya : Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

2) Menurut Imam Nawawi :

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا.

Artinya : Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan.

Dalam hal ini, mereka melakukan penekanan kepada kata milik dan kepemilikan, karena ada juga yang tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa- menyewa. Jual beli diartikan pula dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau

<sup>14</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h.22

<sup>15</sup> Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015), h.157



barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).<sup>16</sup>

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak yang menyerahkan ganti pertukaran atas suatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam artian khusus ialah suatu ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan sipembeli ataupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.100.

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 69-70

## b. Landasan Hukum Jual Beli

Hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh jika terjadi praktik *ikhtikar* yaitu penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik.<sup>18</sup>

Ada beberapa landasan hukum jual beli dalam Islam yang mempertegas antara lain Al-Qur'an, Hadist dan ijma'. Adapun antara lain dasar hukum berdasarkan Al-Qur'an sebagai berikut :

### 1) Al-Qur'an

Jual beli di sahkan oleh Al-Qur'an berdasarkan QS. Al-

Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan

<sup>18</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.114

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusanya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba). Maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah:275).<sup>19</sup>

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan mengharamkan riba Allah SWT. Tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli ataupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang memungkinkan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.<sup>20</sup>

Dan terdapat juga pada surat An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yag beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu,

<sup>19</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: Dipenogor,2010), h.47

<sup>20</sup>Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h. 173-174

dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Ani-Nisa:29).<sup>21</sup>

## 2) Hadist

Landasan dasar hukum jual beli dipertegas juga dalam hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi bahwa :

أَنَّ النَّبِيَّ سُعِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلٌ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ<sup>22</sup>

Artinya : Bahwa Rasulullah Saw ditanya ketika salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik, Rasulullah ketika itu menjawab pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).

Dalam hadis yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abu S'aid :

حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ لَنَا جُرُجُ، الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواهابوداود)<sup>23</sup>

Artinya : Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatannya di surga) dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhada.

## 3) Ijma

Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadis. Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun

<sup>21</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 64

<sup>22</sup> Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal*, Juz 28, No.17265 (Beirut: Al-Risalah, 2001), h.502

<sup>23</sup> Bukhori, Abu' abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Al-Bukhori*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h.268

demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang membutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>24</sup> Sementara dalam legitimasi *ijma'*, dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkan jual beli. Jual beli sebagai *mu'amalah* melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terdapat kedholiman atau tindakannya tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56-115.<sup>25</sup>

Hukum jual beli menurut Islam diperbolehkan asalkan jangan ada yang dirugikan atau ada yang dicurangi dalam sistem jual beli tersebut. Begitu pula menurut Imam asy-Syatibi pakar fiqh Maliki, hukum mubah boleh berubah menjadi wajib apabila yang mubah ditinggalkan secara total.<sup>26</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (*penjual dan pembeli*), dan *ma'uqudalaih* (objek akad).

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila sebelum *ijab dan qabul* dilakukan

<sup>24</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.75

<sup>25</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo, 2016), h. 25

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2017), h.114



sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.<sup>27</sup>

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut Sudarsono rukun dan syarat jual beli terbagi menjadi dua, yaitu :<sup>28</sup>

1) Penjual dan Pembeli, memenuhi syarat :

- a) Bukan dipaksa (kehendaknya sendiri). Maksudnya bahwa melakukan transaksi jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melaksanakan transaksi bukan karena paksaan melainkan kemauannya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas kehendaknya sendiri tidak sah. Menurut QS. An-Nisa:29 disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling\ memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”

<sup>27</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 70

<sup>28</sup>Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 396-398.

- b) Baligh dan berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur Ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus *akilbaligh* dan berakal. Baligh menurut hukum Islam adalah dikatakan *baligh* (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haid*) bagi anak perempuan. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi ia belum dewasa menurut ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan
- c) untuk melakukan jual beli, khususnya untuk barang yang kecil dan tidak bernilai.
- d) Keduanya tidak mubazir. Maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingannya semata.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta:Sinar Grafika,2000), 131.

2) Uang dan benda yang diperjualbelikan, dengan syarat :<sup>30</sup>

- a) Keadaannya suci (barang tidak najis). Maksudnya bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau diharamkan
- b) Memiliki manfaat. Maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya beras, kue, ikan, buah-buahan dan lain sebagainya, dinikmati keindahannya misalnya lukisan, kaligrafi, hiasan rumah dan lain-lain, dinikmati suaranya seperti radio, tv, kaset dan lain sebagainya, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu. Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan adalah kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan dalam syariat Islam atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam yang berlaku.
- c) Barang sebagai objek dapat diserahkan dengan cepat ataupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang

---

<sup>30</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 70

atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, karena didalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

- d) Barang itu kepunyaan yang menjual, kepunyaan yang diwakilkannya atau yang menguasakannya.
- e) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini padamu.
- f) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- g) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56 Bab IV juga menjelaskan mengenai rukun jual beli, bahwasannya rukun jual beli ada 3 yaitu :<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 30-31.

a. Pihak-pihak

Yaitu merupakan penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam jual beli tersebut.

b. Objek

Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.<sup>32</sup>

c. Kesepakatan

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.<sup>33</sup>

Kesepakatan penjual meliputi :

- 1) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.
- 2) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati, dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.
- 3) Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli sekalipun tidak dinyatakan dengan langsung.

---

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h.168.

<sup>33</sup> Saipudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017) h. 154



- 4) Pembeli boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskan untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.
- 5) Pembeli diperbolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), sighat (ijab dan qabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.<sup>34</sup>

Syarat-syarat sah ijab kabul hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam suatu majelis dan juga tersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya ijab dan kabul. Syarat sah ijab kabul yaitu sebagai berikut :<sup>35</sup>

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab begitu juga sebaliknya.
2. Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul.

---

<sup>34</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003)h. 118

<sup>35</sup>Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 68

3. Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
4. Ijab dan qabul harus diterima oleh kedua belah pihak.
5. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul
6. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

Dalam transaksi jual beli ada harga, dalam harga pun ada syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli) harus jelas nominalnya.
2. Harga boleh diserahkan ketika akad, baik secara tunai maupun kredit. Jika barang dibayar kemudian (utang) maka harus jelas waktu pembayarannya.
3. Jika jual beli itu dilakukan secara barter, jika barangnya sejenis maka kuantitas nya harus sama, tetapi jika

---

<sup>36</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 68

barangnya tidak sejenis maka harga, kualitas, dan kuantitas boleh berbeda.

Dapat disimpulkan rukun dan syarat jual beli harus adanya penjual dan pembeli yang bertransaksi, harus sesuai dengan ajaran Islam, tidak ada yang dirugikan dalam jual beli, dan harus sesuai barang yang dibeli dengan barang yang dijual.

#### **d. Macam-macam jual beli**

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut :<sup>37</sup>

- 1) Berdasarkan objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi menjadi tiga macam, yaitu :
  - a) Jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
  - b) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lain.
  - c) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang dengan valuta asing.
- 2) Berdasarkan dari cara penetapan harga, jual beli dibagi menjadi empat macam<sup>38</sup>, yaitu :

---

<sup>37</sup>Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015). h. 147-148.

<sup>38</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.174

- a) Jual beli *musawwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang di dapatnya.
- b) Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu :
  - (1) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.<sup>39</sup>
  - (2) Jual beli *muwadha'ah* (*discount*), yaitu jual beli dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
  - (3) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- c) Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada tunai dan bisa dicicil.
- d) Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dari penawaran penjual dan para pembeli yang menawar. Penawaran tertiggi berhak menjadi pembeli terpilih.

---

<sup>39</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 93

3) Berdasarkan dari segi pembayaran, jual beli dibagi menjadi tiga<sup>40</sup>, yaitu :

1) Jual beli tunai, yaitu jual beli dengan penyerahn barang dan pemaaran secara langsung.<sup>41</sup>

2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*baimajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan dikemudian hari dan bisa dicicil.

3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deffereddelivery*), dibagi menjadi 2 macam yakni sebagai berikut : :

a) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang telah dipesan dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.<sup>42</sup>

b) Jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan disraahkan kemudian.

<sup>40</sup> Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Alaudin University Press, 2013), h.65

<sup>41</sup> "Hukum Jual Beli: Definisi, Klasifikasi, Pembagian dan Syarat" (Online), tersedia di: <https://pengusahamuslim.com/69-hukum-jual-beli-definisi-klasifikasi-pembagian-dan-syarat.html> diakses pada pukul 09.59

<sup>42</sup> Abu Azam Al- Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 213

**e. Jual beli yang dilarang**

- 1) Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli)
  - a) Jual beli orang gila, maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli yang orang yang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.
  - b) Jual beli anak kecil, maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mummayiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara yang ringan.
  - c) Jual beli *fudhlul*, yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri)
  - d) Jual beli dengan orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli dengan orang buta tidak diperbolehkan kecuali barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum buta.<sup>43</sup>
- 2) Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan)
  - a) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

---

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 127



لَا تَشْتَرُوا الشَّمَاكَ فِي لَمَّا عَيْنُهُ غُرُورٌ (رواه احمد)

Artinya :“Janganlah kamu membeli ikan didalam air, karena jual beli seperti ini termasuk gharar (menipu).

*Gharar* itu dilibatkan apabila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan bisnis jual beli.<sup>44</sup> Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli maupun dalam cara pelaksanaannya.<sup>45</sup>

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang adalah:<sup>46</sup>

(1) Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu akad, baik objek akad ini sudah ada maupun belum ada. Contoh nya menjual ikan yang ada di dalam tambak.

(2) Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.

Akad semacam ini merupakan *gharar*, karena terdapat

<sup>44</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV*, (Jogjakarta: Dhana Bhakti Prima Yasa, 1995), h. 161

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h.201

<sup>46</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, h.148

kemungkinan rusak atau hilang objek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal.

- (3) Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- (4) Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual. Umpamanya : “Saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda”, tanpa menentukan ciri-ciri sepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih dipohon dan belum layak dikonsumsi.
- (5) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga barang yang harus dibayar. Umpamanya orang berkata: “Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Padahal jenis beras bermacam-macam dan harganya tidak sama.
- (6) Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Umpamanya: salah satu dari dua potong pakaian yang berbeda mutunya dijual dengan harga yang sama. Termasuk ke dalam jual beli *gharar* adalah jual beli dengan cara undian dalam berbagai bentuknya.
- (7) Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Umpamanya

menjual seekor kuda pacuan yang sedang sakit. Di dalamnya terdapat jual beli *gharar*, karena baik penjual maupun pembeli berspekulasi dalam transaksi ini.

- a) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, maksudnya bahwa jual beli yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.
- b) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama, maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhalal adalah haram.
- c) Jual beli *Muzabanah*, yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik pada padi kering.
- d) Jual beli *Muhaqallah*, yaitu jual beli tanam-tanaman padi yang masih di ladang atau di kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).
- e) Jual beli *Mukhadharah*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan lain sebagainya. Jual beli

seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas) dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiup angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

- f) Jual beli *Mu'ammashah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

- g) Jual beli *Munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, misalnya seseorang berkata : lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada pada ku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

- h) Jual beli sperma binatang, maksudnya bahwa jual beli sperma binatang (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan sapi betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.

i) Jual beli Majhul, yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di dalam tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut Jumhur Ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.<sup>47</sup>

3) Jual beli yang dilarang karena Lafadz (ijab kabul)

a) Jual beli *Mu'athah*, yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijab* dan *qabul*, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b) Jual beli tidak bersesuaian dengan *ijab* dan *qabul*, maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan *ijab* dari pihak penjual, dan *qabul* dari pihak pembeli, maka jual beli ini dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

c) Jual beli *Munjiz*, yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dikatakan tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

d) Jual beli *Najasyi*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud

---

<sup>47</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2016), h.80

mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri)<sup>48</sup>

- e) Menjual di atas penjualan orang lain. Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخارى و مسلم)

“Rasulullah SAW bersabda : seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain”.

- f) Jual beli di bawah harga pasar. Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia menjual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli ini dilarang karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

- g) Jual beli *Inah*, yaitu jual beli barang secara tunai dengan barang tertentu, lalu barang tersebut dijual kembali oleh pembeli secara kredit dengan harga yang lebih mahal.

---

<sup>48</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.113



- h) Jual beli yang dilakukan dengan cara memaksa salah satu pihak, jual beli ini selain dapat membatalkan akad jual beli juga dilarang oleh Allah Swt.<sup>49</sup>
- 4) Jual beli yang dilarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait
- a) Jual beli dari orang yang masih tawar menawar, apabila ada dua orang yang masih tawar menawar atas suatu barang, maka terlarang bagi orang lain untuk membeli barang itu sebelum penawar pertama diputuskan.
- b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar, maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai kepasar agar mendapat harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini merugikan pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar meskipun akadnya sah. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga pasar naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> M. Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang ; UB Press, 2019), h. 30

<sup>50</sup> Abdul Rahman, Ghazali, *Fikih Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), h.

#### f. Batal dan Berakhirnya jual beli

Batal (*bathil*) yang berarti sia-sia atau tidak benar. Dikatakan batal yaitu akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, dapat diringkas sebagai berikut :<sup>51</sup>

- 1) Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara *syar'i*, dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.
- 2) Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak-pihak itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad *bathil* tersebut.
- 3) Akad *bathil* tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin. Misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara *syar'idan* juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad *maukuf*.
- 4) Akad *bathil* tidak perlu di *fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
- 5) Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap pembatalan.

Berakhirnya akad berbeda dengan *fasakh* dan batalnya, berakhirnya akad karena *fasakh* adalah rusak atau putus akad yang mengikat antara *muta'qidain* (kedua belah pihak yang

---

<sup>51</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 245-246

melakukan akad) yang disebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak *iradah*. Para Fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila :<sup>52</sup>

- a) Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki proses waktu.
- b) Terealisasinya tujuan dari pada akad secara sempurna.
- c) Berakhirnya akad karena *fasakh* atau dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berakad. Prinsip umum dalam *fasakh* adalah masing-masing pihak keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung akad.
- d) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.
- e) Berahirnya akad dengan sebab tidak ada kewenangan dalam akad yang mauquf. Akad mauquf akan berakhir jika yang berwenang al-akad tidak mengizinkan.

#### **g. Berselisih dalam jual beli**

Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hendaklah berlaku jujur, terbuka, sopan (beretika) dan mengatakan

---

<sup>52</sup>Mugianti, *Hukum Perjanjian Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h.42

apa adanya, jangan berdusta dan bersumpah palsu. Sebab yang demikian itu dapat menghilangkan keberkahan dalam jual beli

Sebaliknya pedagang (penjual) yang jujur, benar, dan mengikuti semua ajaran Islam akan dekat dengan para Nabi, sahabat dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat kelak.

Adapun dalam jual beli apabila terjadi perselisihan pendapat antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang atau benda yang diperjualbelikan, maka yang dijadikan pegangan adalah keterangan (kata-kata) yang punya barang, selama keduanya (penjual dan pembeli) tidak mempunyai saksi dan bukti-bukti lain.<sup>53</sup>

#### **h. Etika dalam jual beli**

Definisi etika secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani (*ethikos*), dengan arti “sebagai analisis konsep-konsep terhadap aturan benar atau salah. Aplikasi kedalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral, dengan tanggung jawab penuh”.<sup>54</sup> Dalam kamus webster etika bermakna karakter istimewa, sentimen, tabiat, moral, atau keyakinan yang membimbing seorang, kelompok, atau institusi. Etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu masyarakat, dimana terkandung arti moral atau moralitas seperti apa yang boleh dilakukan yang pantas atau tidak pantas, dan sebagainya. Etika sebagai ilmu adalah studi

---

<sup>53</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 117

<sup>54</sup> Wiwin Kloni, “*Etika Bisnis Islam Dan Solusi Islam Dalam Krisis Ekonomi Global*,” *Jurnal Al-Buhuts*, Vol.11 No. 1 (Juni 2015), h.14

tentang moralitas merupakan suatu usaha untuk mempelajari moralitas masyarakat, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, serta sifat-sifat yang perlu dikembangkan dalam kehidupan.<sup>55</sup>

Etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komitmen dalam bertransaksi, berperilaku, berelasi guna mencapai tujuan bisnisnya dengan selamat.<sup>56</sup> Termasuk moral dan etika dalam berbisnis dan jual beli. Prinsip-prinsip etika bisnis yang diwariskan Nabi Muhammad SAW berupa prinsip-prinsip bisnis modern, seperti tujuan pelanggan, pelayan yang unggul, kompetensi, efisiensi, transparansi, persaingan yang sehat dan kompetitif.<sup>57</sup>

Etika bisnis yang mana sudah diteladani oleh Rasulullah Saw, dimana siapa waktu muda berbisnis dengan memperhatikan kejujuran kepercayaan, dan ketulusan serta keramah tamahan.<sup>58</sup>

Prinsip-prinsip Al-Quran yang berkenaan dengan etika jual beli dalam Islam yaitu :

---

<sup>55</sup>Gustina, "Etika Bisnis Kajian Nilai dan Moral dalam Bisnis" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 3, No.2, (Oktober 2008), h.17

<sup>56</sup> Faisal Badroen, Suhendra, *Etika Bisnis Islam dalam Islam Etika Bisnis Islam dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), h.15

<sup>57</sup> Alie Yafie, *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Jakarta Selatan: Ahad-Net Internasional, 2003) h.11-12

<sup>58</sup> Muhammad Abd Manan, *Teori Praktek Hukum Islam* (Jogjakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), h.288

- 1) Aturan modal Al-Quran, termasuk didalamnya etika jual beli, tidak dibiarkan begitu saja pada keinginan dan kemauan manusia secara semuanya.
- 2) Ada elaborasi sistem, *check and balance*, sebagaimana juga menerapkan hukum yang diatur dalam Al-Quran.
- 3) Negara Islam, institusi hibah dan masyarakat Muslim secara keseluruhan adalah tiga komponen komprehensif dan agen yang efektif yang mampu menerapkan aturan-aturan dan petunjuk Al-Quran yang berkenaan dengan prinsip-prinsip jual beli.<sup>59</sup>

#### **i. Hikmah disyariatkannya jual beli**

Kegiatan jual beli adalah suatu kegiatan yang tidak dilarang oleh agama Islam, terdapat banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari kegiatan jual beli. Islam pun menjelaskan dalam ayat Al-Quran tentang hikmah yang didapatkan jika jual beli yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam.<sup>60</sup>

Berikut hikmah yang didapat dari kegiatan jual beli:

- 1) Mencari serta mendapatkan karunia Allah

Jual beli dapat membantu manusia mendapatkan karunia Allah karena dengan kegiatan jual beli merupakan hal yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia, dengan jual beli kita bisa saling membantu antara penjual dan pembeli sehingga mendapatkan karunia dari Allah Swt.

---

<sup>59</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.169

<sup>60</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 97.



## 2) Menjauhi riba

Kegiatan riba sangat dilarang oleh agama Islam. Untuk itu kegiatan jual beli dapat menjauhkan diri dari riba. Namun tentu saja jual beli yang tidak mengandung unsur riba dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam syariat.

## 3) Menjaga silaturahmi dan memperbanyak ikatan

Kegiatan jual beli dapat menambah silaturahmi dan memperbanyak jejaring di lingkungan masyarakat sekitar. Berbagai kebutuhan yang kita butuhkan dapat kita beli di orang yang berbeda, karena itu kegiatan jual beli sangat membantu kita dalam menambah jaringan silaturahmi.

## 4) Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridho terhadap anugrah Allah SWT.<sup>61</sup>

## 2. Jual Beli Kredit dalam Hukum Islam

### a. Pengertian Jual Beli Kredit

Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan di mana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.118.

<sup>62</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 49

Secara bahasa, *al-taqsith* ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Sedangkan, secara istilah bai' taqs adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan *thamam* relatif lebih tinggi dibanding *thamam* dengan sistem bayar cash.

Salim mengatakan taqs berarti menunda pembayaran utang dengan membagi-bagi ke dalam waktu tertentu. Hingga pembayaran yang diangsur adalah harga pembayarannya disyariatkan terbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu.

Sedangkan Dimyaudin Djuwaini mengatakan jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah waktu tertentu.<sup>63</sup>

Jadi, inti jual beli kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan secara kredit atau secara mengangsur dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai itu diperkenankan. Sebab, itu bagian dari jual beli dan sebagaimana keputusan lembaga Fiqih Islam Nomor 51 tentang jual beli kredit.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Ismail, *Fikih Muamalah*, 100

<sup>64</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer jilid 4* (Jakarta: Republika Penerbit, 2020),

## b. Landasan Hukum Kredit

Dalam jual beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit. Karena adanya kebutuhannya. Serta mengharamkan riba karena adanya penambahan murni karena penundaan.<sup>65</sup>

Ada dua pendapat ulama mengenai hukum jual beli dengan sistem kredit, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang. Pendapat pertama mengatakan diperbolehkan menambah harga sebagai ganti rugi atas penundaan pembayaran. Ulama yang berpendapat demikian antara lain adalah jumhur ulama, termasuk ulama empat mazhab, ulama salaf dan ulama kontemporer.<sup>66</sup>

Kebolehan jual beli kredit itu juga dipahami dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

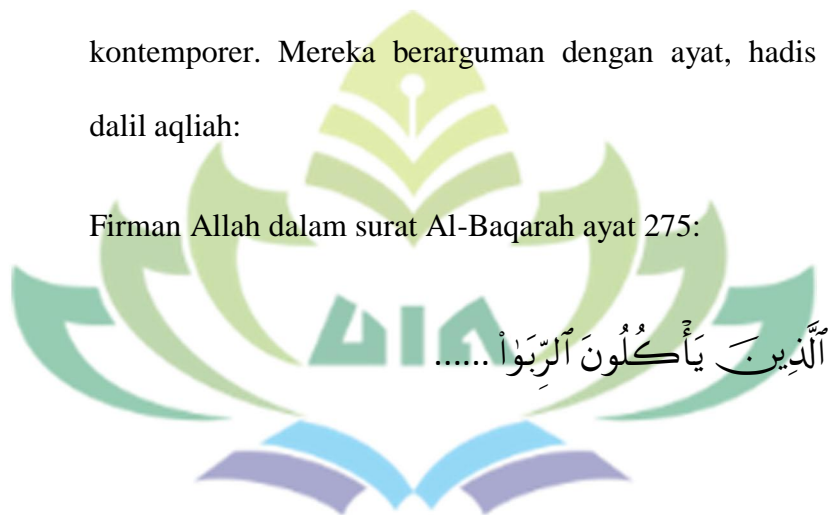
<sup>65</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006), h. 52

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 56

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya.<sup>67</sup>

Adapun kalangan ulama yang melarang jual beli kredit antara lain Zainal Abidin bin Ali bin Husen, Nashir, Mansyur, Imam Yahya dari kalangan Hanafiyah serta kelompok ulama kontemporer. Mereka berarguman dengan ayat, hadis Nabi dan dalil aqliah:

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:



“Padahal Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Ayat di atas mengharamkan riba, termasuk tambahan harga karena pembayaran sebagai pengganti penundaan pembayaran.

Dalil Aqliah antara lain, pengambilan tambahan harga karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli sama halnya dengan pengambilan tambahan pembayaran dalam *qiradh*.

Pengambilan tambahan pembayaran karena penundaan pembayaran dalam *qiradh* diharamkan, maka sama saja apabila diterapkan dalam transaksi jual beli.

Berdasarkan dua pendapat ulama yang memperbolehkan dan yang melarang, penulis lebih condong dengan pendapat ulama yang memperbolehkan jual beli kredit. Terlebih jual beli kredit harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan ulama. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut<sup>68</sup> :

- a) Jual beli kredit jangan sampai mengarah ke riba.
- b) Penjual merupakan pemilik sempurna barang yang dijual.
- c) Barang diserahkan kepada pembeli oleh sang penjual.
- d) Hendaknya barang dan harga bukan jenis yang memungkinkan terjadinya riba nasi'ah.
- e) Harga dalam jual beli kredit merupakan utang (tidak dibayarkan secara kontan)
- f) Barang yang diperjual belikan secara kredit diserahkan secara langsung.
- g) Waktu pembayaran jelas, sesuai dengan kesepakatan, berapa kali angsuran, berapa pembayaran tiap angsuran dan sampai pembayaran berakhir harus jelas dan tidak boleh diingkari salah satu pihak.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli* (Jakarta: Qisthi Press, 2008), h. 35

<sup>69</sup> *ibid*, h. 63

Lembaga Fatwa Saudi telah menjawab hukum penambahan harga dalam jual beli dengan tempo atau jual beli kredit boleh jika prakteknya sesuai dengan syarat-syaratnya, demikian juga dengan kredit angsuran, praktek ini tidak apa-apa dilakukan jika jumlah angsurannya jelas dan telah ditentukan, disamping temponya juga dibatasi.

### c. Syarat dan rukun jual beli kredit

Seperti jual beli biasa, jual beli kreditpun mempunyai rukun dan persyaratan. Ulama Fiqh mengemukakan rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap jual beli kredit sebagai berikut :

- 1) Ada dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli (debitur dan kreditur). Keduanya harus memenuhi syarat : berakal, memiliki kecerdasan bukan sedang dalam keadaan bodoh atau marah, serta memiliki ikhtiar (melaksanakan akad dengan kehendak sendiri bukan karena paksaan).
- 2) Ada barang yang diakadkan (diperjual belikan). Syarat-syarat barang yang diperjual belikan : suci zatnya, bermanfaat, milik sendiri secara sempurna, dapat diserahterimakan, dan dapat di ketahui sifat, jenis, kadar dan kualitasnya.
- 3) Ijab yaitu ungkapan dari pihak penjual sebagai lambang keikhlasannya menyerahkan miliknya kepada pembeli. Dan kabul yaitu ungkapan dari pihak pembeli sebagai lambang kerelaan menerima barang itu sebagai miliknya. Untuk ijab dan kabul itu disyaratkan :terjadi kesinambungan antara keduanya yang memberi kesan bahwa salah



satu diantaranya yang berakad telah mengundurkan diri dari upacara akad jual beli tersebut ijab dan kabul ada persesuaian baik dari segi dan harga, waktu dan cara pembayaran serta ucapan yang digunakan kedua belah pihak adalah dalam bentuk masa lalu, bukan masa yang akan datang.

- 4) Ada harga yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkannya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh harga: jumlah jumlahnya, jelas pembayarannya, dan caraangsuran. Jumlah harga, waktu, serta cara pembayaran harus ditetapkan atas dasar kerelaan bersama, tidak ada yang merasa dipaksa.<sup>70</sup>

## **B. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menelusuri beberapa literatur untuk memudahkan penulis dan menjelaskan acuan peneliti dalam pembuatan skripsi maka penulis menggunakan beberapa tinjauan pustaka sebagai berikut :

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Resa Wulandari, mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Muamalah, 2018. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang penjualan barang kredit”. Adapun hasil penelitian skripsi oleh Resa Wulandari membahas tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam pada kredit penjualan perabot rumah tangga, baju dan alat-alat elektronik, yang mana barang kredit dijual kembali tetapi belum lunas sepenuhnya.

---

<sup>70</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.79

Namun pihak debitur akan tetap membayar lunas barang tersebut walaupun barang tersebut sudah tidak dimilikinya lagi.<sup>71</sup>

Fokus penelitian ini membahas bagaimana pandangan Hukum Islam tentang bagaimana jika barang kredit yang belum lunas tetapi sudah dijual kembali sehingga sangat penting bagi penulis untuk menjadikannya referensi dalam penyusunan skripsi guna mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang penetapan tingkat keuntungan pada jual beli kredit.

*Kedua*, penelitian yang merupakan jurnal yang dilakukan oleh Muhibbudin mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dengan judul “Suatu kajian perspektif Hukum Islam”. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhibuddin, membahas tentang bagaimana status hukum jual beli kredit berdasarkan dalam Hukum Islam. Dimana ada beberapa pandangan para ulama terhadap jual beli kredit, ada yang berpendapat bahwa hukum jual beli kredit itu mutlak diharamkan, adapula diperbolehkan secara mutlak dan adapula yang antara boleh dan tidak boleh.<sup>72</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Sinta Bela, mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Muamalah, 2018. Dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Margin Keuntungan Dalam Pembiayaan

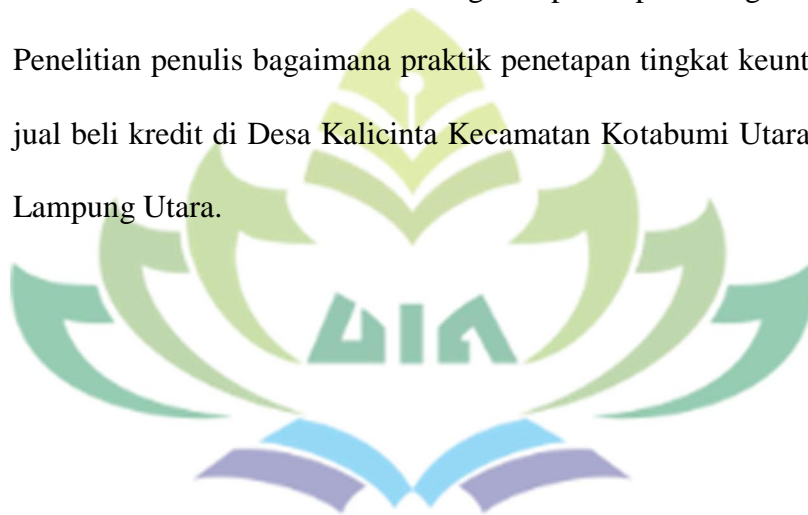
---

<sup>71</sup> Resa Wulandari, “Tinjauan Hukum Islam tentang penjualan barang kredit”, Bandar Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2018

<sup>72</sup> Muhibuddin, “Suatu kajian dalam perspektif hukum islam”, Gorontalo. IAIN Sultan Amai, 2017

Murabahah”. Adapun hasil penelitian skripsi oleh Sinta Bela membahas tentang apakah penentuan margin yang dilakukan oleh bank syariah sudah benar menurut Hukum Islam agar tidak ada yang dirugikan di antara kedua belah pihak.<sup>73</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yakni jika penelitian Resa Wulandari mengenai barang kredit yang belum lunas tetapi sudah dijual kembali, penelitian Muhibbudin mengenai bagaimana status hukum jual beli kredit pada hukum Islam dan Sinta Bela mengenai penetapan margin keuntungan. Penelitian penulis bagaimana praktik penetapan tingkat keuntungan pada jual beli kredit di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.



---

<sup>73</sup> Sinta Bela, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Margin Keuntungan dalam Pembiayaan Murabahah”, Bandar Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2018.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Hukum

Abu ‘abdillah Muhammad Bin Isma’il, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar al-fikr, 1981

Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal*, Juz 28, No, 17265 (Beirut: Al-Risalah, 2001)

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’andan Terjemahannya*, Bandung: Ditenogoro, 2010

### Kamus

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997

Tim Sahabat Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Jakarta: GitaMedia Press

### Buku

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001

Al Arif, Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2015

- Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017
- Amin Suma Muhammad, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Uii Press, 2000
- Azhim Sa'id, Abdul, *Jual Beli*, Jakarta: Qisthi Press Group, 2008
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Cahyani Andi, Intan, *Fiqh Muamalah*, Makassar: Alaudin University Pers, 2013
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Faisal Badroen, Suhendra, et.al *Etika Bisnis dalam Islam Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007
- Ghazaly Rahman, Abdul, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978

- Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Manan, Muhammad Abd, *Teori Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012
- Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Mugianti, *Hukum Perjanjian Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1997
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Thalia Indonesia, 2012
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Pudjihardjo, M, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019
- Rahman, Alfazur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV*, Yogyakarta: Dhana Bhakti Prima Yasa, 1995
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

- Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer jilid 4*, Jakarta: Republika, 2020
- Shidiq, Saipudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2019
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bandung: Kencana, 2003
- Jurnal**
- Alie Yafie, *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Jakarta Selatan: Ahad-Net Internasional 2003)
- Gustina, “Etika Bisnis Suatu Kajian Nilai dan Moral dalam Bisnis” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.3, No.2, (Oktober 2008), h.17
- Muhibbudin, “Satuan Kajian Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.13, No.2, 2017
- Resa Wulandari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit”  
Studi pada warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten



Tanggamus, skripsi Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018

Sinta Bela, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Margin Keuntungan dalam Pembiayaan Murabahah” Studi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, skripsi Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018

Wiwini Kloni, “Etika Bisnis Islam Dan Solusi Dalam Krisis Ekonomi Global,” *Jurnal Al-Buhuts*, Vol.11 No.1, 2015

### **Wawancara**

Berly, Wawancara dengan penulis, 13 November 2020

Eko, Wawancara dengan penulis, 13 November 2020

Hendra, Wawancara dengan penulis, 13 November 2020

Jon, Wawancara dengan penulis, 20 November 2020

Neli, Wawancara dengan penulis, 20 November 2020

Reni, Wawancara dengan penulis, 13 November 2020

Rini, Wawancara dengan penulis, 20 November 2020

Suparno, Wawancara dengan penulis, 24 Agustus 2020

Tika, Wawancara dengan penulis, 13 November 2020

Yusmardi, Wawancara dengan penulis, 20 November 2020

**Sumber Online**

“Hukum Jual Beli: Definisi, Klasifikasi, Pembagian dan Syarat” (On-line),  
tersedia di : <https://pengusahamuslim.com/69-hukum-jual-beli-definisi-klasifikasi-pembagian-dan-syarat.html>

